

BAB I

PENDAHULUAN

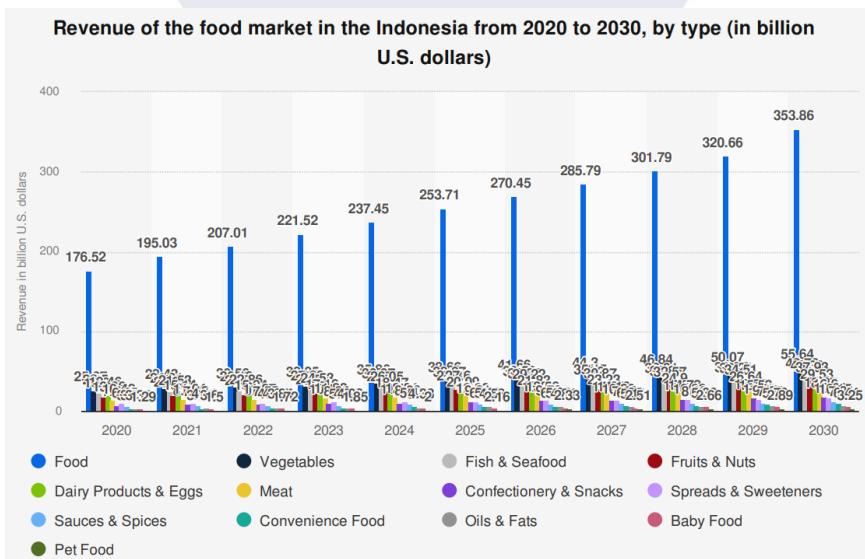
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaku ekonomi merupakan individu maupun kelompok yang berperan dalam aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi dalam suatu perekonomian (Putri, 2019). Konsumsi makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar manusia serta salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global. Sektor makanan dan minuman juga menjadi industri strategis di Indonesia karena memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional (Sukmadiana & Faeni, 2025). Oleh karena itu, perubahan konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Pengaruh perusahaan terhadap konsumsi masyarakat dapat dilihat melalui kinerja perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja, prestasi, dan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan (Awliya, 2022). Salah satu indikator utama untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui kegiatan operasionalnya (Rosita & Nurasyik, 2024). Profitabilitas menggambarkan tingkat keberhasilan perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan penjualan, aset, maupun ekuitas, dan dinilai melalui laporan keuangan seperti neraca serta laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk memperoleh pendapatan (Ibrahimov et al., 2025). Sementara itu, ROE mengukur

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bagi pemegang saham berdasarkan ekuitas yang ditanamkan. ROE dapat menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan modal perusahaan serta menjadi indikator yang diperhatikan investor. ROA dipilih karena mampu menggambarkan efektivitas penggunaan aset perusahaan secara menyeluruh, sedangkan ROE digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memaksimalkan pengembalian bagi pemilik modal. Kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) juga dapat memengaruhi kedua rasio tersebut karena berdampak pada biaya pendanaan dan pendapatan perusahaan. Profitabilitas perusahaan tidak hanya berkaitan dengan rasio ROA dan ROE, tetapi juga perlu dilihat dari tingkat pendapatan (*revenue*) yang dihasilkan, karena pendapatan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.



Gambar 1.1 Pendapatan Sektor Makanan di Indonesia 2020-2030

Sumber: Statista (2025). Diakses dari statista.com

Berdasarkan pendapatan sektor makanan di Indonesia dari tahun 2020 hingga diproyeksikan sampai 2030, dalam satuan miliar dolar AS, secara umum terlihat

bahwa sektor makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga proyeksi 2030. Hal tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian sekaligus tingginya permintaan masyarakat terhadap konsumsi makanan dan minuman. Pada tahun 2020, pendapatan pasar makanan berada di angka sekitar 176.52 miliar dolar AS, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga diproyeksikan mencapai 353.86 miliar dolar AS pada 2030. Peningkatan ini hampir dua kali lipat dalam satu dekade, yang menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman tetap menjadi sektor strategis dengan daya tahan tinggi meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi, *inflation*, maupun kenaikan *tax*.

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Berdasarkan BPS

Kriteria Usaha Berdasarkan BPS Tahun 2021 (Rupiah)	
Usaha	Pendapatan
Usaha Kecil	300 juta - 2.5 Miliar
Usaha Menengah	2.5 Miliar - 50 Miliar
Usaha Besar	>50 Miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021). Diakses dari bps.go.id

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), usaha ini terbagi menjadi tiga, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung sektor makanan dan minuman. Usaha kecil biasanya dijalankan secara perorangan dengan modal dan tenaga kerja yang terbatas, seperti warung makan, kedai kopi sederhana, atau pedagang kaki lima. Lalu, usaha kecil memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2.5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki sistem manajemen yang lebih terorganisir, tenaga kerja lebih banyak, serta jangkauan pasar yang lebih luas. Contohnya adalah

restoran dengan beberapa cabang, *cafe*, usaha katering, dan sebagainya. Usaha dapat dikategorikan sebagai usaha menengah ketika memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Di sisi lain, usaha besar mencakup perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman, seperti jaringan restoran cepat saji, produsen makanan olahan, hingga perusahaan minuman kemasan. Dalam sektor makanan dan minuman, usaha besar berperan dominan dibandingkan usaha menengah.

Di Indonesia sektor makanan dan minuman memiliki banyak sekali perusahaan. Namun, perusahaan yang termasuk dalam BEI dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ritel dan distributor makanan, minuman keras, minuman ringan, produk susu olahan, makanan olahan, dan produk mentah (*meat*, ikan, dan produk unggas). Berikut merupakan tabel kode saham dan nama perusahaan untuk sub-sektor makanan dan minuman:

Tabel 1.2 Nama-Nama Perusahaan di Sektor Makanan dan Minuman

D112 (Ritel & Distributor Makanan)			
No	Kode Saham	Nama perusahaan	Tanggal IPO
1	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.	22-Jan-2020
2	BUAH	Segar Kumala Indonesia Tbk	09-Agu-2022
3	KMDS	Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.	07-Sep-2020
4	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk.	29-Des-2017
5	WICO	Wicaksana Overseas International Tbk.	08-Agu-1994
D211 (Minuman Keras)			
6	BEER	Jobubu Jarum Minahasa Tbk	6-Jan-2023
7	DLTA	Delta Djakarta Tbk.	27-Feb-1984
8	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	15-Des-1981
9	STRK	Lovina Beach Brewery Tbk.	10-Okt-2023
10	WINE	Hatten Bali Tbk	10-Jan-2023

D212 (Minuman Ringan)			
11	ADES	Akasha Wira International Tbk.	13-Jun-1994
12	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk.	10-Jul-2012
13	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.	05-Mei-2017
14	FORE	Fore Kopi Indonesia Tbk	14-Apr-2025
15	GRPM	Graha Prima Mentari Tbk	10-Jul-2023
16	SOUL	Mitra Tirta Buwana Tbk	06-Jan-2023
D221 (Produk Susu Olahan)			
17	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk	19-Des-2017
18	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk	06-Des-2021
19	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.	25-Nov-2019
20	TGUK	Platinum Wahab Nusantara Tbk	10-Jul-2023
21	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk.	2-Jul-1990
D222 (Makanan Olahan)			
22	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	11-Jun-1997
23	BEEF	Estika Tata Tiara Tbk.	10-Jan-2019
24	BOBA	Formosa Ingredient Factory Tbk.	1-Nov-2021
25	BRRC	Raja Roti Cemerlang Tbk	9-Jan-2025
26	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	08-Mei-1995
27	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	09-Jul-1996
28	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk	20-Mar-2019
29	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk.	08-Jan-2019
30	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb	10-Okt-2018
31	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.	22-Jun-2017
32	IBOS	Indo Boga Sukses Tbk	25-Apr-2022
33	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	07-Okt-2010
34	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	14-Jul-1994
35	MAXI	Maxindo Karya Anugerah Tbk	12-Jun-2023
36	MYOR	Mayora Indah Tbk.	04-Jul-1990
37	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk	13-Des-2021

38	NAYZ	Hassana Boga Sejahtera Tbk	06-Feb-2023
39	PMMP	Panca Mitra Multiperdana Tbk.	18-Des-2020
40	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk	18-Okt-1994
41	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	28-Jun-2010
42	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	05-Jan-1993
43	SKLT	Sekar Laut Tbk.	08-Sep-1993
44	STTP	Siantar Top Tbk.	16-Des-1996
45	TAYS	Jaya Swarasa Agung Tbk	06-Des-2021
46	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.	14-Feb-2000
47	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	11-Jun-1990
48	TRGU	Cerestar Indonesia Tbk	08-Jul-2022
49	YUPI	Yupi Indo Jelly Gum Tbk	25-Mar-2025

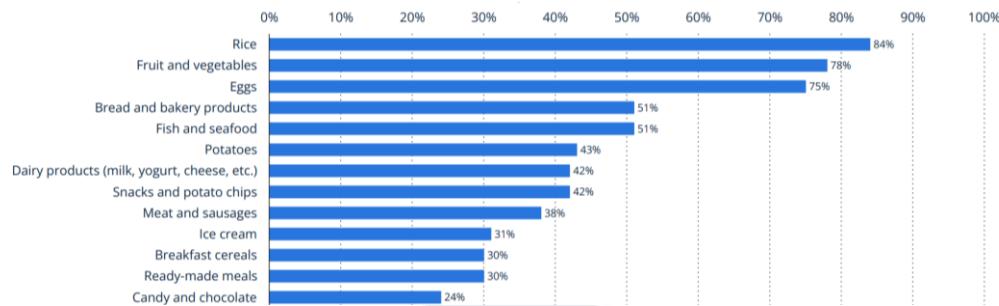
D231 (Ikan, Daging & Produk Unggas)

50	AGAR	Asia Sejahtera Mina Tbk.	02-Des-2019
51	ASHA	Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk	27-Mei-2022
52	AYAM	Janu Putra Sejahtera Tbk.	30-Nov-2023
53	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	18-Mar-1991
54	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.	28-Nov-2006
55	CRAB	Toba Surimi Industries Tbk	10-Agu-2022
56	DEWI	Dewi Shri Farmindo Tbk	18-Jul-2022
57	DPUM	Dua Putra Utama Makmur Tbk.	08-Des-2015
58	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust	24-Mar-2000
59	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa Tbk.	14-Sep-2020
60	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.	12-Feb-2020
61	ISEA	Indo American Seafoods Tbk	08-Jul-2024
62	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	23-Okt-1989
63	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.	10-Feb-2006
64	NEST	Esta Indonesia Tbk	08-Agu-2024
65	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk.	27-Des-1996
66	UDNG	Agro Bahari Nusantara Tbk	31-Okt-2023

67	WMPP	Widodo Makmur Perkasa Tbk	06-Des-2021
68	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk	02-Feb-2021
D421 (Produk Perawatan Tubuh) - Perusahaan yang juga memproduksi makanan dan minuman			
69	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	11-Jan-1982
70	KINO	Kino Indonesia Tbk.	11-Des-2015

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel di atas merupakan daftar nama perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor *consumer non-cyclicals*, khususnya subsektor makanan dan minuman menurut standar IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*). Perusahaan ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti ritel & distributor makanan (D112), minuman keras (D211), minuman ringan (D212), produk susu olahan (D221), makanan olahan (D222), serta ikan, daging, dan produk unggas (D231). Lalu, terdapat tambahan perusahaan yang masuk ke dalam IDX-IC *personal* tetapi perusahaan tersebut juga memproduksi makanan dan minuman seperti UNVR (Unilever Indonesia) dan KINO (Kino Indonesia). Kedua perusahaan tersebut termasuk ke dalam D421 (*personal products*), dikarenakan perusahaan tersebut lebih banyak bergerak pada *personal care* atau perawatan kulit dibandingkan menjual produk makanan dan minuman. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi perusahaan pada subsektor makanan dan minuman, analisis perlu dilanjutkan pada perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dan faktor eksternal seperti makroekonomi sebagai pendorong kinerja sektor ini.



Gambar 1.2 Konsumsi Masyarakat di Indonesia

Sumber: Statista (2024). Diakses dari statista.com

Di Indonesia, pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pokok sehari-hari. Beras menjadi komoditas utama dengan tingkat konsumsi tertinggi dibandingkan dengan produk makanan lainnya. Selain itu, peringkat ke bawah produk jajanan seperti *ice cream*, *cereal*, makanan siap saji, dan permen serta cokelat dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan dan minuman masyarakat Indonesia di tahun 2024 memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar berupa beras, protein hewani, serta sayur dan buah masih mendominasi. Namun, terdapat peningkatan pada konsumsi makanan olahan, jajanan, dan produk selain makanan kebutuhan pokok.

Konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa serta peningkatan inflasi, yang dapat menurunkan nilai riil pendapatan sehingga daya beli masyarakat, khususnya terhadap hasil produksi, menjadi berkurang (Efendi et al, 2020). Kondisi ini menyebabkan harga bahan makanan mengalami lonjakan sehingga memperberat beban pengeluaran rumah tangga. Tidak hanya mengenai inflasi, *gross domestic product* (GDP), dan suku bunga, tetapi hal ini juga dipengaruhi oleh PPN. Ketika terjadi kenaikan PPN, dampaknya pada sektor makanan dan minuman, khususnya produk olahan, dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen. Secara *macroeconomic*, hal ini berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Jallow & Hamadou, 2024).

Sejak 1 April 2022, resmi dinaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tepatnya perubahan di Pasal 7 UU PPN. Namun, meskipun tarif umum naik, tidak semua barang atau jasa terkena dampaknya. Dengan kenaikan tarif PPN nasional, harga jual makanan dan minuman di segmen ritel cenderung meningkat, yang berpotensi membebani konsumen sekaligus mempengaruhi margin pelaku usaha distribusi atau produksi. Sebaliknya, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, warung, rumah makan, hotel, catering, atau layanan boga/katering baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, dampak kenaikan PPN terhadap sektor makanan dan minuman tidak merata dan lebih terasa pada segmen ritel & distribusi (toko swalayan, supermarket, produsen, distributor). Kondisi ini penting bagi pelaku usaha untuk memahami biaya dan beban harga mereka, serta bagi konsumen agar mengetahui kapan tambahan PPN berlaku.

Namun, kebutuhan pokok seperti beras, sayur-sayuran, susu, dan bahan pokok tertentu, serta jasa dasar seperti pendidikan, kesehatan, jasa sosial, penyediaan air bersih, dan layanan dasar dibebaskan dari PPN. Sementara itu, daging *premium* dan buah-buahan *premium* masih terkena beban PPN 11%. Dampak PPN yang lebih tinggi dapat mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat karena banyak barang/jasa yang dibeli konsumen sehari-hari terkena PPN. Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat dalam membayar pajak melalui penerapan berbagai regulasi terbaru di bidang perpajakan (Agasie & Zubaedah, 2022). Bagi pemerintah, hal ini meningkatkan penerimaan negara, namun bagi masyarakat kebijakan ini berpotensi menekan daya beli karena harga barang dan jasa naik. Oleh sebab itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rentan terhadap konsumsi masyarakat, khususnya pada konsumsi barang lokal dan jasa (Ndlovu & Schutte, 2024).

Tabel 1.3 Pajak Pertambahan Nilai di ASEAN

No.	Negara	Pajak Pertambahan Nilai
1	Filipina	12%
2	Indonesia	11%
3	Vietnam	10%
4	Laos	10%
5	Kamboja	10%
6	Malaysia	10%
7	Singapura	9%
8	Thailand	7%

Sumber : Wicaksono, 2024

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negara-negara ASEAN bervariasi, tergantung pada kebijakan fiskal masing-masing negara. Berdasarkan perbandingan terbaru, Filipina saat ini menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan, yaitu sebesar 12%, sedangkan Indonesia berada tepat di bawahnya dengan tarif 11% yang mulai diberlakukan sejak April 2022. Secara global, perkembangan kondisi makroekonomi menunjukkan bahwa banyak negara menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, termasuk menaikkan *Value Added Tax* (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai upaya memperkuat stabilitas penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi internasional. Kenaikan tarif ini dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi dasar perubahan tarif PPN nasional dari sebelumnya 10%. Meskipun hanya naik 1%, dampaknya signifikan karena PPN terhadap harga barang konsumsi, terutama pada sektor makanan dan minuman yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Dampaknya bagi perusahaan, khususnya subsektor *food*

and beverages, terlihat pada penyesuaian harga jual, penurunan volume penjualan, serta peningkatan beban administrasi perpajakan. Selain itu, dampak PPN tercermin dalam *earning after tax* (EAT) karena perubahan pada pendapatan dan biaya dapat memengaruhi laba bersih.

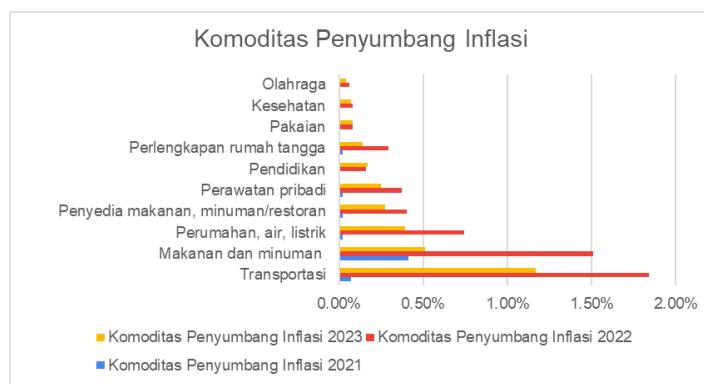
Dengan terjadinya kenaikan PPN di Indonesia, hal ini berdampak pada harga jual dan daya beli masyarakat serta mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama pada laba bersih setelah pajak atau *earning after tax* (EAT). Kenaikan pajak secara tidak langsung seperti PPN cenderung meningkatkan harga jual dan menurunkan jumlah permintaan, sehingga dapat menekan pendapatan perusahaan (Mgammal, 2021). EAT dapat mencerminkan dampak langsung kebijakan PPN terhadap laba akhir perusahaan, mengingat EAT merupakan komponen laba yang telah dipengaruhi oleh seluruh beban, termasuk pajak.

Characteristic	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Brunei	-1.26%	1.02%	-0.39%	1.94%	1.73%	3.68%	0.37%	0.5%
Cambodia	2.91%	2.46%	1.94%	2.94%	2.92%	5.33%	2.14%	0.66%
Indonesia	3.81%	3.29%	2.82%	2.03%	1.56%	4.14%	3.71%	2.48%
Laos	0.83%	2.04%	3.32%	5.1%	3.75%	22.96%	31.23%	22.03%
Malaysia	3.8%	0.97%	0.66%	-1.14%	2.48%	3.38%	2.49%	2.8%
Myanmar	4.62%	5.94%	8.63%	5.73%	3.64%	18.39%	27.1%	22%
Philippines	2.85%	5.31%	2.39%	2.39%	3.93%	5.82%	5.98%	3.33%
Singapore	0.58%	0.44%	0.56%	-0.18%	2.31%	6.12%	4.82%	2.58%
Thailand	0.67%	1.07%	0.71%	-0.85%	1.23%	6.08%	1.23%	0.54%
Timor-Leste	0.52%	2.29%	0.89%	0.49%	3.78%	7.01%	8.42%	3.25%
Vietnam	3.52%	3.54%	2.8%	3.22%	1.84%	3.16%	3.25%	4.14%

Gambar 1.3 Data Inflasi di ASEAN

Sumber: Statista (2024). Diakses dari statista.com

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kestabilan ekonomi suatu negara. Data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di negara-negara ASEAN dari tahun 2017 hingga perkiraan tahun 2024. Terlihat bahwa inflasi di kawasan ini cenderung berfluktuasi dengan variasi yang cukup tajam antarnegara. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi domestik maupun global yang memengaruhi kestabilan harga di Indonesia. Tingginya inflasi berdampak buruk pada perekonomian karena melemahkan daya beli masyarakat (Tan & Uprasen, 2023). Jika dibandingkan dengan negara lain, inflasi Indonesia relatif lebih terkendali dibandingkan negara lainnya seperti Laos dan Myanmar yang mengalami lonjakan inflasi sangat tinggi, masing-masing mencapai 31.23% dan 27.1% pada tahun 2023. Sebaliknya, negara-negara seperti Brunei dan Thailand cenderung memiliki inflasi yang rendah, bahkan beberapa tahun mencatat angka negatif yang menandakan *deflation*. Hal ini memperlihatkan perbedaan struktur ekonomi, kebijakan moneter, dan ketahanan fiskal antarnegara ASEAN dalam menghadapi guncangan ekonomi.



Gambar 1.4 Komoditas Penyumbang Inflasi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024). Diakses dari bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021–2023, terlihat bahwa tekanan inflasi di Indonesia didominasi oleh kelompok pengeluaran transportasi, makanan dan minuman (*food and beverages*), serta perumahan, air,

dan listrik. Pada tahun 2021, kontribusi inflasi relatif stabil dengan sektor makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar sebesar 0.41%, sementara transportasi hanya memberikan andil kecil yaitu 0.07%. Memasuki tahun 2022, kondisi perekonomian mendorong sektor transportasi melonjak drastis menjadi 1.84%, menjadikannya kontributor inflasi tertinggi pada tahun tersebut. Sektor makanan dan minuman juga mengalami peningkatan tekanan harga hingga mencapai 1.51% sebagai akibat dari kenaikan harga pangan global, gangguan pasokan, serta dampak lanjutan dari kenaikan biaya distribusi. Namun, pada tahun 2023, tekanan inflasi mulai mereda seiring stabilisasi harga energi dan membaiknya rantai pasok.

Komoditas transportasi pada periode tertentu memang menjadi penyumbang inflasi yang besar. Sektor transportasi sangat dipengaruhi faktor sektoral yang kuat dan sering bersifat kebijakan, seperti penyesuaian harga BBM, subsidi/kompensasi, pengaturan tarif, serta regulasi operasional, sehingga perubahan ROA dan ROE berpotensi lebih banyak mencerminkan kebijakan pemerintah dan lonjakan biaya energi daripada hubungan murni dengan variabel makro yang diteliti. Sebaliknya, subsektor *Food & Beverages* dipilih karena berhubungan langsung dengan konsumsi harian masyarakat dan memiliki transaksi yang tinggi, sehingga mekanisme PPN dan perubahan harga lebih mudah terobservasi dalam kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, permintaan F&B cenderung lebih stabil, sehingga profitabilitas perusahaan di subsektor ini lebih representatif untuk melihat bagaimana variabel makro memengaruhi laba, aset, dan pengembalian ekuitas tanpa terlalu didominasi distorsi regulasi sektor-spesifik.

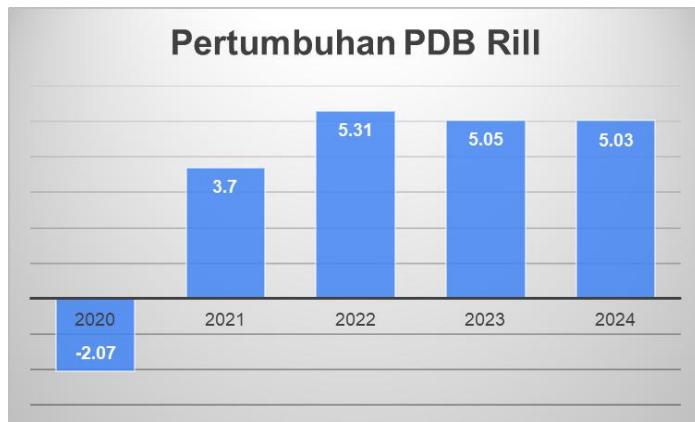
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



Gambar 1.5 Inflasi Sektor Makanan & Minuman di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Diakses dari bps.go.id

Perkembangan inflasi sektor makanan dan minuman di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, inflasi sektor ini berada pada level 3.63%. Pada tahun 2021, inflasi bahkan sedikit menurun menjadi 3.09%, yang menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman masih terkendali seiring pemulihan ekonomi yang berjalan bertahap. Namun, memasuki tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan menjadi 5.83%. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya harga pangan global, gangguan rantai pasok, serta faktor lainnya. Tekanan inflasi ini kembali berlanjut hingga tahun 2023 dengan inflasi sektor makanan dan minuman yang naik ke 6.18%, menandakan bahwa dampak eksternal memengaruhi kestabilan harga kebutuhan pokok. Pada tahun 2024, grafik menunjukkan adanya perbaikan signifikan di mana inflasi kembali turun ke 1.90%. Penurunan ini mencerminkan stabilitas pasokan dan harga pangan yang lebih baik.



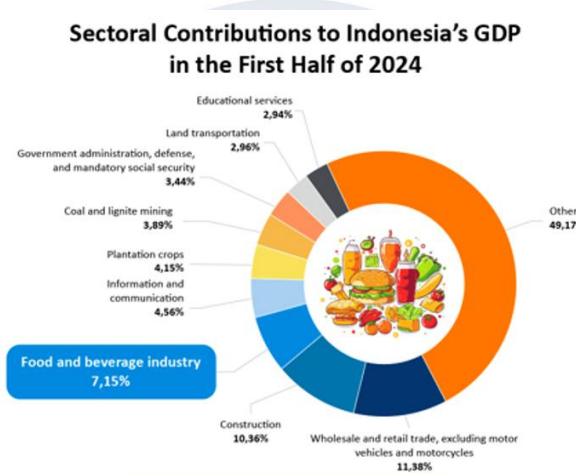
Gambar 1.6 Data Pertumbuhan Gross Domestic Product di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Diakses dari bps.go.id

Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) ini memengaruhi konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi PDB dalam negara maju dan negara berkembang yaitu perkembangan ekonomi dari negara itu sendiri (Prawoto, 2025). Perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi nasional yang signifikan. PDB riil menggambarkan perubahan output ekonomi yang telah disesuaikan dengan inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nyata. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDB Indonesia tercatat -2.07%, menandakan terjadinya kontraksi ekonomi yang cukup dalam akibat dampak pandemi yang terjadi pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021, kondisi ekonomi mulai membaik seiring dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan PDB yang berbalik positif menjadi 3.70%, meskipun masih berada di bawah tingkat normal pra-pandemi. Berlanjut pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh lebih kuat mencapai 5.31%, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, ekspor yang naik akibat tingginya harga komoditas global, serta pemulihan industri dan pariwisata. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi masih terjaga di kisaran 5.05%, menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah

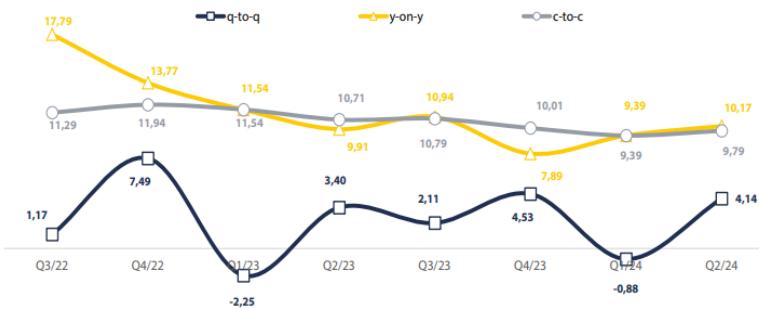
ketidakpastian global seperti perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang dan tekanan geopolitik internasional. Tahun 2024 menampilkan stabilitas pertumbuhan dengan angka 5,03%, menandakan bahwa Indonesia telah berhasil kembali pada tren pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan setelah guncangan pandemi.



Gambar 1.7 Kontribusi PDB Sektor Makan dan Minum

Sumber: CRIF, 2025. Diakses dari <https://www.id.crifasia.com>

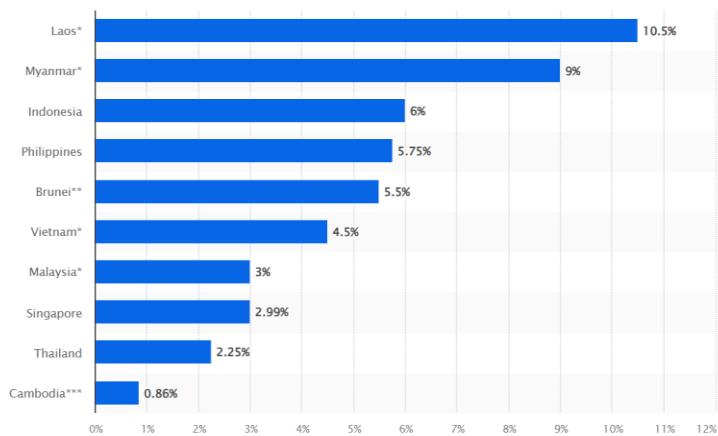
Berdasarkan grafik, industri *Food & Beverage* (F&B) menyumbang 7,15% PDB Indonesia pada semester I 2024 dan disebut sebagai kontributor terbesar ke-3 setelah wholesale & retail trade dan konstruksi. Meski konstruksi dan *wholesale & retail trade* lebih besar kontribusinya, keduanya tidak dipilih karena hasil ROA/ROE lebih berpengaruh terhadap faktor industri yang sangat spesifik. Konstruksi sangat bergantung pada siklus proyek, termin pembayaran, dan belanja infrastruktur sehingga profitabilitasnya sering lebih ditentukan dinamika proyek daripada variabel makro yang Anda uji. Sementara *wholesale & retail trade* sangat heterogen dan profitabilitasnya kuat dipengaruhi perputaran persediaan, strategi diskon/promosi, serta persaingan kanal, sehingga hubungan PPN, inflasi, PDB, dan suku bunga terhadap ROA dan ROE menjadi lebih sulit dikendalikan pengaruhnya.



Gambar 1.8 PDB Pertumbuhan Sektor Makan dan Minum

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Diakses dari bps.go.id

Pola pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh musiman (*seasonality*) serta dinamika permintaan masyarakat. Secara keseluruhan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif dan sangat dipengaruhi musim, dengan lonjakan kuat pada akhir tahun (Q4) akibat meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat, sementara awal tahun cenderung mengalami pelemahan. Meski sempat mengalami kontraksi pada Q1/2023, sektor ini secara konsisten kembali pulih pada kuartal-kuartal berikutnya dan bahkan mencatat *rebound* pertumbuhan pada 2024, mencerminkan bahwa pemulihan sektor ini relatif cepat dan sangat responsif terhadap peningkatan aktivitas pariwisata serta konsumsi rumah tangga.



Gambar 1.9 Suku Bunga Di Berbagai Negara

Sumber: Statista (2025). Diakses dari statista.com

Dari data terlihat bahwa terdapat perbedaan kebijakan moneter yang cukup signifikan antar negara. Laos dan Myanmar mencatatkan suku bunga tertinggi, menunjukkan bahwa kedua negara tersebut sedang menghadapi tekanan ekonomi seperti inflasi tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, dan risiko keuangan yang lebih besar sehingga bank sentral perlu menetapkan suku bunga yang ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia berada pada posisi ketiga dengan tingkat suku bunga 6%. Setelah itu, terdapat Filipina dan Brunei yang juga menerapkan tingkat suku bunga relatif tinggi, menandakan upaya menjaga daya beli serta stabilitas harga di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Sementara itu, beberapa negara ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura menunjukkan tingkat suku bunga yang lebih rendah, yang biasanya mengindikasikan inflasi yang lebih terkendali serta sistem keuangan yang lebih stabil. Thailand berada di angka 2.25%, dan Kamboja menjadi negara dengan suku bunga terendah yaitu 0.86%.



Gambar 1.10 Suku Bunga di Indonesia

Sumber: Trading Economics (2025). Diakses dari tradingeconomics.com

Tingkat suku bunga dapat mengurangi laba perusahaan, sebab meningkatnya bunga pinjaman akan sejalan dengan bertambahnya beban biaya utang. Selain itu, saat bunga naik, masyarakat cenderung memilih menyimpan uang di bank sehingga berpengaruh terhadap penurunan penjualan dan keuntungan perusahaan (Suharyanto & Zaki, 2021). Suku bunga acuan di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, suku bunga berada pada level 3.75%, kemudian menurun sedikit menjadi 3.50% pada tahun 2021. Namun, memasuki tahun 2022 suku bunga mengalami kenaikan signifikan menjadi 5.50%. Bank Indonesia merespons situasi tersebut dengan mengetatkan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas harga dan mengontrol inflasi. Pada tahun 2023, suku bunga kembali dinaikkan menjadi 6% sebagai langkah lanjutan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam batas sasaran yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2024, suku bunga tetap dipertahankan di level 6%, menunjukkan posisi kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan fokus pada stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dengan adanya perubahan kebijakan moneter seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, dan perubahan pada suku bunga, hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada pembelian konsumen termasuk pada sektor

makanan dan minuman. Kenaikan PPN menjadi 11% mulai April 2022 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perusahaan di sektor makanan dan minuman di Indonesia. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, makanan dan minuman yang diproduksi oleh pabrik serta dijual melalui jaringan ritel seperti supermarket dan minimarket merupakan objek PPN.

Hal ini menyebabkan adanya kenaikan harga pada produk makanan dan minuman yang diterima konsumen karena pajak tersebut harus dipungut dan disetorkan oleh pelaku usaha. Kenaikan beban pajak ini dapat menekan daya beli masyarakat sehingga perusahaan berisiko mengalami penurunan volume penjualan apabila konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga. Selain itu, pelaku industri juga menghadapi peningkatan biaya administrasi dan tanggung jawab kepatuhan pajak yang lebih besar untuk memastikan pemungutan PPN dilakukan dengan benar. Berbeda dengan sektor restoran, hotel, dan katering yang dikenakan pajak daerah alih-alih PPN pusat, produsen serta pelaku usaha ritel makanan dan minuman menanggung dampak langsung dari kenaikan PPN.

Pada sektor makanan dan minuman, inflasi justru mengalami tekanan lebih kuat terutama pada 2022 dan 2023 akibat kenaikan harga komoditas pangan global dan biaya distribusi. Namun, inflasi sektor ini kembali turun signifikan pada 2024, menandakan peningkatan stabilitas pasokan pangan serta efektivitas kebijakan pengendalian harga pangan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Inflasi di kawasan ASEAN menunjukkan fluktuasi yang beragam, namun Indonesia termasuk negara dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan stabilitas harga domestik di Indonesia masih mampu meredam tekanan eksternal sehingga menjaga daya beli masyarakat.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan pemulihan yang kuat setelah kontraksi pada 2020 akibat pandemi. Setelah mengalami pertumbuhan negatif, ekonomi Indonesia kembali pulih pada 2021 dan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Pertumbuhan yang stabil di kisaran 5.00% pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil kembali pada jalur

pertumbuhan yang sehat, didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pemulihan industri, serta naiknya permintaan domestik dan ekspor. PDB sebagai indikator utama aktivitas ekonomi mencerminkan kekuatan permintaan dalam negeri sebagai motor pertumbuhan Indonesia.

Tingkat suku bunga di negara-negara ASEAN berbeda-beda sesuai tekanan inflasi dan kondisi ekonomi masing-masing negara. Laos dan Myanmar memiliki suku bunga tertinggi karena menghadapi inflasi tinggi dan ketidakstabilan nilai tukar, sedangkan Indonesia berada pada posisi menengah dengan suku bunga 6%. Di Indonesia, suku bunga acuan sempat turun pada 2021 namun mengalami kenaikan signifikan pada 2022 dan bertahan di kisaran 6% pada 2023–2024 sebagai respons terhadap tekanan inflasi global dan pelemahan nilai tukar. Kenaikan suku bunga berdampak langsung pada biaya pinjaman perusahaan dan daya beli masyarakat. Masyarakat cenderung menahan konsumsi dan memilih menabung ketika suku bunga tinggi sehingga penjualan industri makanan dan minuman dapat menurun. Selain itu, biaya modal perusahaan bertambah sehingga menekan profitabilitas sektor F&B.

Makroekonomi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan suku bunga merupakan faktor eksternal yang paling langsung memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan kinerja keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman. Kondisi ini berbeda dengan variabel makro lain seperti nilai tukar atau pengangguran yang pengaruhnya terhadap sektor makanan dan minuman bersifat lebih tidak langsung. Inflasi dipilih karena sektor makanan dan minuman merupakan penyumbang inflasi terbesar selama 2021–2023 sehingga perubahan tingkat inflasi sangat memengaruhi biaya bahan baku, distribusi, dan harga akhir produk yang berdampak pada margin keuntungan perusahaan.

Secara keseluruhan, fenomena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), serta perubahan suku bunga berpotensi menimbulkan pergeseran pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Konsumen menjadi lebih selektif dalam membeli produk makanan dan minuman, cenderung beralih ke merek yang lebih terjangkau serta mengurangi pembelian produk *premium*. Kondisi ini memberikan tekanan langsung kepada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di BEI karena sektor ini sangat dipengaruhi oleh perubahan harga konsumsi, struktur pajak, dan daya beli masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu termasuk Ibrahimov et al. (2025) masih berfokus pada variabel makroekonomi umum seperti inflasi, suku bunga, PDB, pengangguran, dan nilai tukar. Hal ini menimbulkan *knowledge gap* karena belum banyak studi yang memasukkan variabel kenaikan PPN tahun 2022, padahal perubahan tersebut secara langsung memengaruhi struktur biaya, harga jual, dan profitabilitas perusahaan.

Pada penelitian ini menggunakan subsektor *Food & Beverages* (F&B) karena Berdasarkan data, industri F&B menyumbang 7,15% terhadap PDB nasional pada semester I 2024, menjadikannya salah satu sektor terbesar ketiga setelah perdagangan besar-eceran dan konstruksi. Data BPS (2025) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB sektor F&B relatif stabil dan positif, dengan tren yang cenderung meningkat kembali pada kuartal II 2024 mencapai 4,14% (q-to-q) dan 10,17% (y-on-y), mencerminkan daya tahan sektor ini terhadap tekanan ekonomi makro. Sementara itu, dari sisi inflasi (BPS, 2024), kelompok makanan dan minuman terus menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Sektor *wholesale & retail trade*, transportasi, dan konstruksi tidak dipilih karena kinerja ROA/ROE pada tiga sektor tersebut cenderung lebih kuat dipengaruhi faktor industri yang sangat spesifik sehingga pengaruh PPN, inflasi, PDB, dan suku bunga menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, subsektor *Food & Beverages* dipilih karena lebih relevan dengan konsumsi harian dan transaksi tinggi, sehingga hubungan variabel makro terhadap profitabilitas lebih dapat dianalisis secara lebih terarah.

Pada penelitian ini, terdapat *population gap* mengingat penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada konteks negara lain dan berbagai sektor industri secara luas, sementara penelitian mengenai perusahaan *food and beverages* di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda masih terbatas. Lalu, tedapatnya

empirical gap dikarenakan kurangnya penelitian yang menempatkan PPN sebagai faktor penentu profitabilitas, terutama pada industri makanan dan minuman yang rentan terhadap perubahan regulasi dan fluktuasi ekonomi, menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas Sub-Sektor Food and Beverages di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka berikut merupakan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian untuk diangkat dalam penelitian ke dalam penelitian ini:

1. Apakah *Earning After Tax* (EAT) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE)?
2. Apakah perubahan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE)?
3. Apakah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE)?
4. Apakah kenaikan perubahan pada suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE)?
5. Apakah pajak pertambahan nilai, inflasi, produk domestik bruto, dan suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA dan ROE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan fenomena yang ada. Berikut merupakan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Earning After Tax* (EAT) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE).

2. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan inflasi terhadap profitabilitas (ROA dan ROE).
3. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE).
4. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan suku bunga terhadap profitabilitas (ROA dan ROE).
5. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan suku bunga terhadap profitabilitas (ROA dan ROE).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat positif berbagai pihak, berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini untuk berbagai pihak:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat membantu perusahaan dalam memahami pengaruh faktor makroekonomi, khususnya dampak pajak pertambahan nilai (PPN), inflasi, produk domestik bruto (PDB), dan suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis dan keuangan yang lebih tepat guna mencegah terjadinya kerugian serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman investor mengenai hubungan kondisi makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, investor dapat melakukan analisis yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi, sehingga mampu meminimalisir risiko dan mengoptimalkan potensi keuntungan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, memperluas periode penelitian, atau menggunakan metode analisis yang berbeda untuk memperkaya literatur terkait pengaruh faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan.

4. Bagi universitas atau pihak akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan dan investasi. Hasil penelitian dapat menjadi bahan ajar maupun literatur tambahan yang relevan bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi yang ingin memahami hubungan antara faktor makroekonomi dan kinerja pasar saham.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup, berikut merupakan batasan yang ada di penelitian ini :

1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor *food and beverage* dan telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan harus merupakan termasuk dalam kategori usaha besar dengan *revenue/pendapatan* diatas 50 Miliar berdasarkan BPS.
3. Perusahaan harus memiliki laporan keuangan secara yang lengkap
4. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder untuk meneliti sebuah profitabilitas perusahaan pada sub-sektor *food and beverage* dengan dampak makro ekonomi seperti PPN, inflasi, PDB dan suku bunga.

5. Variabel penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, PDB dan suku bunga Bank Indonesia.
6. Penelitian ini menganalisis profitabilitas perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator utama. Kedua ukuran ini dipilih karena mampu menggambarkan kinerja finansial setiap emiten serta menunjukkan bagaimana perusahaan merespons perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi industri makanan dan minuman.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini dengan dikelompokan menjadi beberapa BAB :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan pada laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori yang mendukung dari variabel-variabel pada penelitian ini sebagai landasan teori penelitian, hipotesis, model penelitian, dan penelitian terdahulu. Teori pada variabel penelitian ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), inflasi, produk domestik bruto, dan suku bunga Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

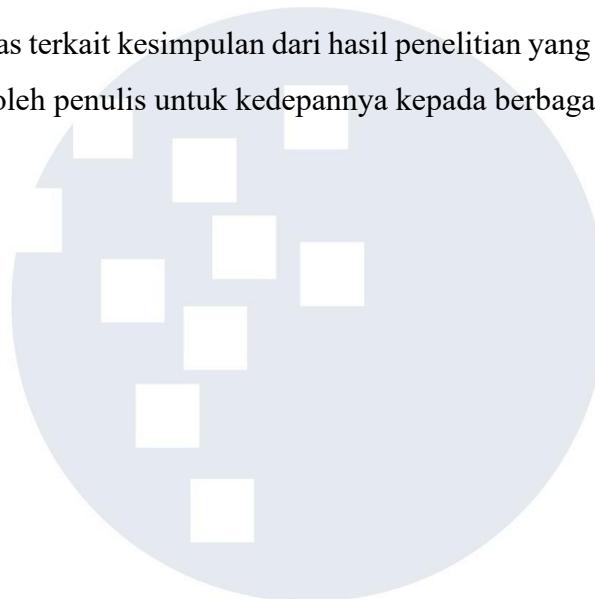
Pada bab 3 akan membahas mengenai metode penelitian seperti objek penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 akan membahas terkait analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan. Dalam bab ini, akan diuji terkait variabel-variabel (X) pada penelitian terhadap variabel (Y).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran diberikan oleh penulis untuk kedepannya kepada berbagai pihak.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA